



Implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama di Kota Madiun

Arif Akbar Pamungkas 1 ✉, Universitas PGRI Madiun
Ninik Sriyani 2, Universitas PGRI Madiun
Yahya Reka Wirawan 3, Universitas PGRI Madiun

✉ arif_1802107010@mhs.unipma.ac.id

Abstrak: Kelompok usaha bersama salah satu program untuk mengurangi angka kemiskinan. Kelompok usaha bersama adalah program bantuan modal usaha yang dilaksanakan secara kelompok untuk masyarakat yang tergolong miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yaitu pendampingan dan membantu membuat serta pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan program kelompok usaha bersama di Kota Madiun diawali pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan manfaat adanya program kelompok usaha bersama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mewujudkan ekonomi mandiri. Simpulan dari penelitian ini adalah program kelompok usaha bersama dapat meningkatkan kesejahteraan serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kata kunci: Penanggulangan Kemiskinan, Kelompok Usaha Bersama, Pendapatan Masyarakat.



PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang berkembang. Permasalahan negara berkembang adalah kemiskinan. Menurut Jacobus, Kindangen, dan Walewangko (2018) masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan masalah yang bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Pada prinsipnya penganggulangan kemiskinan berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak terlantar dan fakir miskin negara bertanggungjawab memelihara. Dengan demikian, negara memiliki tanggungjawab penuh terkait penyelesaian kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara yang berkembang ataupun negara yang tergolong miskin. Akan tetapi, negara yang tergolong maju juga menghadapi permasalahan kemiskinan. Sehingga, permasalahan kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang harus di selesaikan. Faktor yang menyebabkan kemiskinan mulai dari lapangan pekerjaan yang kurang, adanya korupsi, dan individu yang tidak mempunyai tekad untuk merubah nasib. Dampak kemiskinan yang dirasakan oleh negara yaitu menghambat pertumbuhan perekonomian. Salah satu indikator kemiskinan yaitu pengangguran.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas salah satunya yaitu Kota Madiun. Masyarakat Kota Madiun memiliki permasalahan kemiskinan yaitu pengangguran. Menurut Ridzky (dalam Suropto dan Subayil, 2020) menyebutkan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan karena dengan adanya pengangguran yang tinggi berdampak pada laju pertumbuhan yang lambat sehingga bisa menyebabkan kemiskinan. Selain itu, adanya pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Sehingga, manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan kesulitan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Kota Madiun pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 penduduk miskin Kota Madiun sebesar 4,35%, pada tahun 2020 sebesar 4,98%, dan pada tahun 2021 5,09%. Peningkatan angka kemiskinan di Kota Madiun banyak faktornya mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran dan adanya pandemi covid 19. Kota Madiun memiliki permasalahan yang sedang dihadapi seperti adanya pengangguran.

Penanggulangan kemiskinan merupakan langkah untuk menciptakan sebuah keadilan sosial dan menjaga persatuan yang mana sesuai dengan amanat UUD 1945. Menurut Sudradjad (2018) penanggulangan kemiskinan adalah suatu program melalui masyarakat untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang banyak. Hal ini dapat mengurangi pengangguran, jika kondisi ini dilaksanakan terus menerus bukan mustahil penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan terhapus. Program penanggulangan kemiskinan memerlukan adanya kolaborasi mulai dari pemerintah, mitra, maupun masyarakat. Kolaborasi ini memiliki tujuan untuk lebih efisien dalam menjalankan program dan program dapat berkelanjutan. Selain itu kolaborasi ini memiliki fungsi yaitu pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Sehingga, tindakan korupsi dapat di kurangi.

Pemerintah Kota Madiun saat ini sedang membangun infrastruktur. Adanya pembangunan infrastruktur ini diharapkan angka kemiskinan di Kota Madiun mengalami penurunan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun membuat kebijakan untuk penganggulangan kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2019) kelompok usaha bersama merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Menurut Wulan, Ati, dan Widodo (2019) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membentuk kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program bantuan langsung sosial untuk mengelola usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Tujuan program kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan keterampilan. Selain itu, program kelompok usaha bersama dapat meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota. Program kelompok usaha bersama dijalankan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yaitu pendampingan dan membantu pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi. Pelaksanaan program kelompok usaha bersama di Kota Madiun yang sudah berjalan berada di Kecamatan Taman. Produk yang dijual oleh kelompok usaha bersama sangat beragam mulai dari kue basah, aneka keripik, sambal pecel dan masih banyak lagi. Menurut Indrasari (2019) Keragaman produk merupakan kumpulan seluruh produk barang yang ditawarkan penjual.

Penelitian ini relevan dengan penelitian dari Beni, Manggu, dan Sadewo (2021) hal ini dikarenakan, hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat sangat antusias dalam mengikuti pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana program ini memiliki tujuan untuk keluar zona kemiskinan. Dalam penelitian terbaru yaitu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama yang mana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pentingnya untuk dilakukan penelitian melalui implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama di Kota Madiun.

Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya dirasakan oleh semua negara. Akan tetapi, faktor terjadinya kemiskinan antara negara maju dengan negara berkembang memiliki perbedaan. Negara maju terjadinya faktor kemiskinan di dominasi oleh pribadi atau dengan kata lain ketidakmampuan seseorang untuk menjalani kehidupan untuk meningkatkan pendapatan ataupun kebiasaan yang tidak memiliki manfaat seperti seseorang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun kecanduan minuman alkohol. Sedangkan, faktor kemiskinan yang terjadi di negara berkembang jauh lebih kompleks. Menurut Suharto (2013) faktor terjadinya kemiskinan yaitu faktor individual, faktor sosial, faktor kultural dan faktor struktural.

Faktor individual yaitu faktor kemiskinan yang disebabkan karena individual yang memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan kerja dan memiliki kebiasaan buruk seperti kecanduan minimal alkohol. Faktor sosial yaitu faktor kemiskinan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak mendukung. Faktor kultural yaitu faktor kemiskinan yang disebabkan oleh budaya yang masih kental dengan tradisi sehingga masyarakat akan sulit untuk mengembangkan potensinya. Sedangkan faktor struktural yaitu faktor kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pejabat negara yang hanya bisa dirasakan oleh sebagian orang, sehingga rasa keadilan tidak tercapai.

Penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Menurut Pratama, Purnomo, dan Agustiyara (2020) Dalam upaya pengentasan kemiskinan pemerintah sudah melaksanakan berbagai hal diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, tabungan keluarga sejahtera dan kredit usaha rakyat. Program kedepan untuk pengentasan kemiskinan pemerintah juga memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Prayitno (dalam Triani, Panorama, dan Sumantri, 2020) strategi pengentasan kemiskinan ada 3 pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro kemiskinan, pemerintah, dan pembangunan sosial.

Strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan pemerintah sudah banyak dilakukan mulai dari pembangunan nasional, perluasan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Menurut Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (2020) strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi 3, yakni perlindungan sosial, peningkatan kualitas pelayanan di semua bidang, Pengembangan program yang berkelanjutan. Penentuan strategi dalam penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa pengentasan kemiskinan adalah suatu program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok Usaha Bersama

Kelompok usaha bersama adalah program pemerintah dibidang usaha yang dibentuk secara kelompok dengan masyarakat yang tergolong miskin. Menurut Sipahutar, Nadeak, dan Ramadhani (2021) kelompok usaha bersama adalah sekelompok masyarakat sosial yang dibentuk dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin melalui program kesejahteraan sosial. Tujuan pembentukan kelompok usaha bersama menurut Karunia, Wardie, dan Taufik (2020) adalah meningkatkan motivasi, interaksi, dan kerjasama kelompok untuk memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal serta dapat memperluas akses pasar

Pelaksanaan program kelompok usaha bersama pada prinsipnya sama seperti kegiatan usaha seperti UMKM. Menurut Rudjito (dalam Ariawan, 2022) menyebutkan “Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia”. Program kelompok usaha bersama salah satu program yang bersifat berkelanjutan artinya ketika program ini selesai diharapkan masyarakat dapat meneruskan. Dalam menjalan program masyarakat akan didampingi oleh Dinas Sosial setempat.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2019) pendampingan kelompok usaha bersama adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan kelompok usaha bersama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Manfaat adanya program kelompok usaha bersama sangat banyak salah satunya dapat meningkatkan rasa soildaritas antar sesama. Menurut Sofyan, Abidin, dan Lubis (2021) solidaritas merupakan suatu kata yang menggambarkan betapa kuatnya hubungan antara anggota dalam suatu grup.

Program kelompok usaha bersama dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Gustina, Novita, dan Triadi (2022) pendapatan adalah hasil penjualan faktor-faktor produksi. Pengembangan program kelompok usaha bersama tentu harus ada manajemen untuk kegiatan usahanya. Menurut Handoko (2015) manajemen adalah kebijakan yang berdasarkan melalui fungsi perencanaan, kepemimpinan dan pengawasan. Adanya manajemen ini diharapkan kelompok usaha bersama dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, bentuk pengembangan kelompok usaha bersama adalah ilmu pemasaran. Menurut Ayodya (2020) strategi pemasaran itu ada tiga yakni menentukan target penjualan, menentukan cara penjualan, dan menentukan strategi pemasaran.

Menurut Budiarto, Putero, Suyatna, Astuti, Saptoadi, Ridwan, dan Bambang (2015) Prinsip-prinsip pengembangan UMKM harus berdasarkan Kemaslahatan, kemandirian bangsa, terukur, dan komprehensif. Dalam pengembangan sebuah usaha tentu memperhatikan manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Menurut Kasmir (2014) Manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, sumber pendanaan serta instrument keuangan. Tujuan manajemen keuangan yaitu meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan laba, menciptakan kesejahteraan, meningkatkan nama baik perusahaan, dan meningkatkan tanggung jawab sosial serta pengalokasian anggaran secara efisien.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok usaha bersama adalah suatu program dari pemerintah untuk megentaskan kemiskinan melalui pembentukan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin untuk meningkatkan suatu perekonomian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan metode penelitian kualitatif dipilih dikarenakan sesuai topik pembahasan yang membutuhkan pencaharian data secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Pemilihan metode penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan data yang terbaik karena subyek penelitiannya terlibat langsung dalam fenomena yang akan diteliti. Pemilihan subyek

penelitian dilakukan dengan menyesuaikan data yang diperlukan, berikut rincian subyek penelitian pada tabel 1:

TABEL 1. *Rincian Subyek Penelitian*

No	Subyek Penelitian	Tujuan Wawancara	Jumlah
1.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun	Untuk memperoleh informasi tentang program dan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun	1 Informan
2.	Pendamping kelompok usaha bersama	Untuk memperoleh informasi tentang teknis pelaksanaan dan proses pendampingan program kelompok usaha bersama	1 Informan
3.	Pelaku kelompok usaha bersama	Untuk memperoleh informasi terkait pelaku kelompok usaha bersama serta hambatan yang dialami	4 Informan

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yaitu langkah peneliti untuk mencari data. Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti yaitu persiapan, pengumpulan data, validitas data, analisis data, penarikan simpulan, dan penyusunan laporan. Persiapan merupakan tahap awal untuk memulai penelitian untuk mengurus perizinan, dan pemilihan subyek penelitian. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data yaitu terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu proses pengujian data atau validitas data menggunakan triangulasi data. Setelah itu, melakukan analisis data. Tahapan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Prosedur penelitian selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini menjawab rumusan masalah. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan laporan. Penyusunan laporan disesuaikan dengan format yang ada hal ini dikarenakan dalam menyampaikan hasil penelitian pembaca mudah untuk memahaminya.

Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian instrument pengumpulan data adalah hal yang paling penting, hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian adalah untuk mencari data. Instrumen pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan dalam proses penelitian untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan observasi pasif. Observasi pasif adalah proses pengamatan yang datang ke tempat penelitian, akan tetapi tidak ikut terlibat. Pengumpulan data selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data ataupun informasi kepada subyek penelitian yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data dengan dokumentasi. Pelaksanaan dokumentasi ini untuk mencari data atau informasi berupa dokumen, catatan, serta transkrip kegiatan dengan tujuan untuk melengkapi data penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah aktivitas analisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang pokok untuk difokuskan. Selanjutnya, penyajian data dapat diartikan aktivitas analisis data

dengan cara menyusun data dengan sistematis untuk memudahkan pemahaman terkait penyampaian hasil. Tahap selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian yang berguna menjawab rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dalam menjalankan program pengangulungan kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama sebagai pendamping dan membantu pembuatan serta pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Bentuk pendampingannya diawali pembentukan kelompok, pemantauan dalam melaksanakan program, dan membuat suatu kumpulan untuk membahas evaluasi terkait pelaksanaan program. Sebelum membantu pembuatan dan pengajuan proposal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun memberikan tawaran kepada masyarakat yang tergabung dalam program keluarga harapan untuk mengikuti program kelompok usaha bersama. Alasan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun memberikan tawaran kepada masyarakat yang tergabung dalam program keluarga harapan yaitu untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi. Setelah masyarakat menerima tawaran tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun membuat kelompok berdasarkan kelurahan masing-masing. Selanjutnya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun membantu pembuatan dan pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan kelompok usaha bersama diawali pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi. Setelah proposal tersebut diterima maka kelompok usaha bersama akan mendapat modal sebesar Rp 20.000.000,00. Modal tersebut digunakan untuk kegiatan program. Penggunaan modal tersebut berdasarkan kesepakatan kelompok. Dalam pelaksanaan kelompok usaha bersama akan didampingi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Pelaksanaan kelompok usaha bersama sama halnya dengan UMKM. Perbedaannya adalah keuntungan yang didapat oleh kelompok usaha bersama dibagi berdasarkan kesepakatan kelompok. Dalam melaksanakan program tersebut salah satu kelompok usaha bersama Kota Madiun memiliki prestasi juara 3 di tingkat Provinsi.

Manfaat adanya program kelompok usaha bersama ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Program kelompok usaha bersama dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas. Selain itu, adanya program kelompok usaha bersama diharapkan masyarakat tidak bergantung kepada bantuan pemerintah.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah sebagai pendamping dan membantu pembuatan serta pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2019) Pendampingan kelompok usaha bersama adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan kelompok usaha bersama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Persyaratan mengikuti program kelompok usaha bersama di Kota Madiun mengikuti program keluarga harapan. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2019) persyaratan mengikuti program kelompok usaha bersama salah satunya yaitu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mulai dari membantu pemasaran produk, pemantau progres kemajuan program, evaluasi kegiatan, dan mengadakan kumpulan rutin 1 bulan sekali.

Pelaksanaan kelompok usaha bersama pada dasarnya seperti pelaksanaan UMKM. Menurut Rudjito (dalam Ariawan, 2022) UMKM adalah usaha yang punya peranan penting

dalam perekonomian Indonesia. Menurut Tanjung (2017) salah satu ciri-ciri UMKM adalah sumber daya manusia mayoritas lulusan SMA. Berdasarkan konsep ekonomis dalam kegiatan jual beli mengedepankan konsep pengeluaran minimalis serta keuntungan yang didapat maksimal. Untuk mencapai konsep tersebut masyarakat harus memiliki minimal pengetahuan biaya produksi. Menurut Rosyidi (2017) Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan output. Pelaksanaan kelompok usaha bersama diawali pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi. Setelah pengajuan proposal diterima maka kelompok usaha bersama mendapat modal sebesar Rp 20.000.000,00. Dalam menjalankan program modal tersebut digunakan sesuai kesepakatan kelompok. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam menjalankan suatu program tentu memiliki kendala. Salah satu kendala dalam menjalankan program kelompok usaha bersama adalah pada saat pemasaran produk pada awal penjualan. Sejalan hal tersebut menurut Surya (2021) kendala dalam menjalankan suatu usaha adalah pemasaran.

Manfaat adanya program kelompok usaha bersama yaitu untuk mewujudkan ekonomi mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan rasa solidaritas antar anggota. Adanya peningkatan pendapatan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan penelitian dari Yusriadi, Tahir, Awaluddin, dan Misnawati (2020) penerapan program *socialpreneur* kepada masyarakat miskin dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, adanya program ini masyarakat memiliki mata pencaharian baru. Berdasarkan hal tersebut menurut Septiana (2018) mata pencaharian merupakan kegiatan manusia untuk meningkatkan perekonomian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di sampaikan tentang implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama Di Kota Madiun dapat di simpulkan bahwa peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yaitu sebagai pendamping dan membantu membuat serta pengajuan proposal ke Dinas Sosial Provinsi, Pelaksanaan program kelompok usaha bersama berdasarkan dari kesepakatan bersama, dan program kelompok usaha bersama dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mempererat tali silaturahmi serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Saran bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai acuan dalam menjalankan penelitian yang sejenis dan sebagai sumber ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, J. (2022) Peranan Manajemen SDM Sebagai Kebangkitan UMKM Ditengah Pandemi Pada Komunitas UMKM Pasar Lama Kota Tangerang', *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 395–400.
- Ayodya, W. (2020) *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Beni, S., Manggu, B. and Sadewo, Y. D. (2021) Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat, *Kancanegara Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 4(1), 75–82.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Bambang, S. D. (2015) *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (2020) *Modul Pengantar Sepakat Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- Gustina, L., Novita, W. and Triadi, Y. (2022) Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padang, *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 4(1), 152–161.
- Handoko, T. H. (2015) *Manajemen*. (2nd ed.) Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Indrasari, M. (2019) *Pemasaran Dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. and Walewangko, E. N. (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103.
- Karunia, S., Wardie, J. and Taufik, E. N. (2020) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus Pada KUBE Fakir Miskin "Sama Handi" di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas), *Journal of Environment and Management*, 1(1), 23–30.
- Kasmir (2014) *Pengantar Manajemen Keuangan*. (2nd ed.) Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, diakses pada April 5, 2022. [https://kemensos.go.id/kube#:~:text=Kelompok%20Usaha%20Bersama%20\(KUBE\)%20merupakan,pendapatan%20dan%20kesejahteraan%20sosia%201%20keluarga](https://kemensos.go.id/kube#:~:text=Kelompok%20Usaha%20Bersama%20(KUBE)%20merupakan,pendapatan%20dan%20kesejahteraan%20sosia%201%20keluarga).
- Pratama, N. B., Purnomo, E. P. and Agustiyara (2020) Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 64–74.
- Rosyidi, S. (2017) *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Septiana, S. (2018) Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencarian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, *Sabda*, 13(1), 83–92.
- Sipahutar, Z., Nadeak, B. and Ramadhani, P. (2021) Penerapan Metode Composite Performance Index (CPI) Dalam Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 13(4), 255–260.
- Sofyan, M. R., Abidin, Z. and Lubis, F. M. (2021) Makna Solidaritas Dalam Film It Chapter Two, *Jurnal Semiotika*, 15(2), 119–132.
- Sudradjad (2018) *Kiat Mengentaskan Pengangguran Dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*. Jakarta: Bumi Askara.
- Suharto, E. (2013) *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Suripto and Subayil, L. (2020) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017, *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 27–178.
- Surya, A. (2021) Analisis Faktor Penghambat UMKM Di Kecamatan Cileungsi, *Jurnal Ekobis*, 11(2), 342–350.
- Tanjung, M. A. (2017) *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Triani, Y., Panorama, M. and Sumantri, R. (2020) Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 159–178.

- Wulan, Y. C., Ati, N. U. and Widodo, R. P. (2019) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 104–109.
- Yusriadi, Tahir, S. Z. B., Awaluddin, M., & Misnawati. (2020) Pengentasan Kemiskinan Melalui Socialpreneur, *JPM Wikrama Parahita*, 4(2), 115–120.